

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN KOMPLEKSITAS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017)**

M. Saferi¹, Erly Mulyani²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: moesaawidjaya@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the effect of local revenue, size of local government, and complexities of local government on internal control weaknesses in West Sumatra province. This study is categorized as causative research. The population in this study are local governments of West Sumatra province of 2014 to 2017. By using purposive sampling method, there were 19 local governments as the research's sample. The type of data used is secondary data and used is panel regression analysis. The results of this study indicate that local revenue, size of local government, and complexities of local government has no significant effect on internal control weaknesses of local governments.*

Keywords : *complexities; internal control weaknesses; local revenue; size.*

How to cite (APA 6th style):

Saferi, M & Mulyani, Erly. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(1), Seri B, 2234-2249.

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses sistematis pada aktivitas yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan hingga memberikan kepastian dan dapat memenuhi tujuan organisasi berupa aktivitas yang lebih efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, serta pengamanan kekayaan negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijelaskan oleh PP Nomor 60 2008. Temuan kelemahan SPI dari kab/kota Sumatera Barat relatif beragam. Dari rentang 2014-2017 ada beberapa kab/kota Sumbar yang mengalami penurunan jumlah temuan kelemahan SPI. Tetapi, beberapa kab/kota Sumatera Barat yang lain mengalami peningkatan jumlah temuan kelemahan SPI. Bahkan, dalam rentang tersebut ada yang jumlah temuan SPI nya naik turun. Dari temuan tersebut, dapat dilihat bahwa Kab/kota Sumatera Barat tidak serius dalam mengatasi hasil temuan kelemahan SPI nya. Padahal SPI merupakan suatu yang penting terkait dalam bagaimana

bertindak dalam menciptakan laporan keuangan yang andal, efektif, dan efisien serta berguna dalam menilai kepatuhan instansi terhadap hukum.

Faktor-faktor memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Untuk mendanai konsumsi daerah, pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (Martani 2017). PAD tentunya memiliki peranan utama dalam sumber pendanaan dan pembiayaan daerah, jika suatu daerah memiliki PAD yang besar maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Ukuran sebuah perusahaan dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian internal (Putri, 2015). Penelitian ini memproksikan ukuran perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Dengan banyaknya aset yang dimiliki pemerintah akan menyadarkan pemerintah bahwa pentingnya penerapan pengendalian internal yang memadai sehingga menimbulkan peningkatan pengawasan yang diperlukan terhadap aset yang dimiliki pemerintah. Pemerintah akan lebih mengoptimalkan pengelolaan kekayaan yang dimiliki dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan dan pengawasan pengelolaan kekayaan, sehingga pemerintah mampu menekan jumlah kesenjangan dan penyelewengan yang akan terjadi dalam pengelolaan aset daerah.

Kompleksitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat terjadinya kelemahan pengendalian internal Puspitasari (2013). Kelemahan Pengendalian Internal yang tinggi diduga disebabkan oleh tingkat kompleksitas yang tinggi dalam sebuah perusahaan., hal ini dikarenakan tingginya tingkat kerumitan aktivitas organisasi sehingga akan sulit dalam menerapkan dan mengawasi pengendalian internal yang ada. Jumlah kecamatan dan jumlah SKPD bisa menjadi alat perhitungan atau proksi dalam menentukan kompleksitas. Permasalahan pengendalian internal muncul karena pemerintah terlalu banyak memiliki segmen atau cabang sehingga sulit untuk disamakan. Pada penelitian ini akan memproksikan kompleksitas pemerintah daerah dengan jumlah SKPD. Penggunaan jumlah SKPD sebagai kompleksitas pemerintah daerah didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013) sebelumnya. Banyaknya jumlah SKPD pada pemerintah daerah akan mengakibatkan banyaknya diversifikasi sehingga menyebabkan kompleksnya pengendalian internal yang dilakukan, seperti kesulitan penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan SKPD yang berbeda.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kelemahan Sistem Pengendalian Internal telah banyak dilakukan namun masih terjadinya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan Abdul majid dkk (2017) menemukan terdapatnya pengaruh positif PAD tetapi tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan penelitian Puspitasari (2013), dan Hartono (2014), tidak menemukan adanya hubungan antara PAD dengan kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Setelah dicermati hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, sehingga menarik untuk dilakukannya penelitian kembali. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutomo (2018), membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Internal daerah. Penelitian menurut Pamuji (2017), menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Internal pemerintah daerah.

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang biasa digunakan dalam kontrak bisnis selama ini. Prinsipal dan agen merupakan dua unsur dalam teori keagenan dimana teori keagenan terjadi

ketika pihak yang dikatakan prinsipal melimpahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (pihak agen). Pihak prinsipal berharap kepada pihak agen agar menjalankan tugas dengan sebaik baiknya dan bertindak sesuai keinginan prinsipal agar dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan pihak prinsipal itu sendiri. Puspitasari (2013), mengemukakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dan di implementasikan pada organisasi nirlaba atau dalam pemerintahan publik. Teori keagenan timbul dan menilai bahwa pemerintah selaku pihak agen yang di limpahkan amanah tidak melaksanakan tugas yang di emban dengan sebaik baiknya. Sehingga pemerintah sebagai agen tidak bisa dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Arens (2012), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, pimpinan yang berada dibawah mereka untuk memberikan kepastian bahwa tujuan pengendalian yaitu keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan layak tercapai.

2. Komponen Pengendalian Internal

PP No. 60 (2008), menjelaskan bahwa suatu perusahaan dapat mencapai tujuan pengendalian internalnya dengan menerapkan lima komponen:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Pengendalian Resiko
- c. Prosedur Pengendalian
- d. Pemantauan Pengendalian.
- e. Sistem Informasi

3. Prosedur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002), mengemukakan beberapa prosedur pengendalian internal, yaitu:

- a. Karyawan yang kompeten, dapat diandalkan, dan Etis.
- b. Pemberian Tanggung Jawab.
- c. Pemisahan Tugas.
- d. Audit.
- e. Dokumen
- f. Perangkat Elektronik.
- g. Pengendalian Lainnya

4. Pemahaman Atas Pengendalian Internal

Mulyadi (2002) mengemukakan pemahaman auditor tentang pengendalian internal digunakan untuk:

- a. Kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan.
- b. Salah saji material yang potensial dapat terjadi.
- c. Resiko deteksi.
- d. Perancangan ujian substantif.

5. Kelemahan Pengendalian Internal

Kelemahan pada pengendalian internal merupakan kelemahan yang signifikan, atau gabungan dari kelemahan yang signifikan yang hasilnya terlalu melampaui dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak bisa dihindari atau dideteksi (Nirmala, 2012).

Susanto (2007), menerangkan beberapa keterbatasan yang ada dalam pengendalian internal yang mengakibatkan tidak dapat berfungsi dengan baik, yaitu:

- a. Kesalahan (*Error*), muncul ketika perhatian karyawan selama bekerja pecah.
- b. Kolusi (*Collusion*), konspirasi antara dua atau lebih anggota karyawan untuk melakukan pencurian (korupsi) di tempat mereka bekerja.
- c. Penyimpangan manajemen,
- d. Manfaat dan biaya, konsep jaminan yang meyakinkan arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat perhatian karyawan yang dihasilkan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan juga sebagai tulang punggung pendanaan pembiayaan daerah. Kemajuan dan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber kekayaan daerahnya sendiri. Hal ini didasarkan pada sumber pendanaan yang dimiliki daerah yang berasal dari PAD memiliki keunggulan di dibandingkan dengan sumber pendanaan yang dimiliki pemerintah bukan dari PAD. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga dipengaruhi oleh jumlah PAD yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Semakin besar PAD yang dimiliki daerah akan mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap APBD.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah merupakan sebuah skala yang menunjukkan besar kecilnya kondisi Pemerintah Daerah (Hartono, et al., 2014). Ferry serta Jones dalam penelitian yang dilakukan Hartono (2014), mengatakan tolak ukur yang dapat dijadikan acuan untuk menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan yaitu: total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva.

Kompleksitas

Kompleksitas dalam pemerintahan daerah dapat ditinjau melalui beberapa aspek. Penelitian ini menggunakan SKPD sebagai proksi dalam mengukur ke kompleksan dalam pemerintah daerah. SKPD dapat meninjau tingkat kebutuhan daerah terhadap pelayanan umum. Semakin luas wilayah kerja yang dimiliki daerah, semakin besar pula masalah yang akan timbul berkenaan dengan sistem pengendalian internal dimana pemerintah daerah akan kesulitan dalam menerapkan pengendalian internal karena setiap segmen dan cabang memiliki pemahaman yang berbeda dalam menerapkan sistem pengendalian internalnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas daerah terhadap kelemahan pengendalian internal telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011), meneliti “*Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, PAD dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*” membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Aini (2017), meneliti “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kompleksitas daerah dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah*” (studi empiris pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia Periode 2011-2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal, PAD berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kelemahan pengendalian internal, sedangkan kompleksitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Penelitian oleh Pamuji (2017), meneliti “Pengaruh Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pemerintah Daerah” (studi empiris pada kabupaten/kota diprovinsi D.I.Y tahun 2019-2014) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran, dan kompleksitas berpengaruh tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal, sedangkan PAD berpengaruh signifikan terhadap Pengendalian internal

Pendapatan Asli Daerah dengan Kelemahan Pengendalian Internal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dengan mengumpulkan pendanaan dari berbagai usaha pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan daerah sebagai pembiayaan kegiatan pemerintah daerah maupun pembangunannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. PAD memiliki peranan dalam pembiayaan daerah, (Petrovits, Shakespeare, dan Shih, 2010). Penelitian Martani dan Zaelani (2011), mengemukakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki sumber PAD lebih tinggi dan lebih banyak justru akan memiliki kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011),

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan Pengendalian Internal.

Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal

Ukuran sebuah entitas merupakan tingkat aktivitas yang ada di dalam entitas tersebut. Putri (2015), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran besar berarti perusahaan tersebut memiliki laju bisnis yang besar. Perusahaan yang memiliki aktivitas bisni yang besar akan mempermudah perusahaan tersedut dalam mendapatkan akses sumber pendanaan sehingga perusahaan membutuhkan penerapan pengendalian internal yang baik dan memadai di lingkungan perusahaan.

Alasan penggunaan total aset sebagai proksi dari ukuran pemerintah daerah dikarenakan total aset mampu menentukan kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk keperluan daerah. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah menyadarkan pihak manajemen pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap aset pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah berusaha untuk mengelola dan mengawasi aset daerah yang dimilikinya, sehingga dapat menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pengawasan internal yang baik terhadap aset agar dapat terjaga dengan baik (Putri, 2015).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan semakin besar ukuran yang dimiliki pemerintah daerah akan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal.

Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

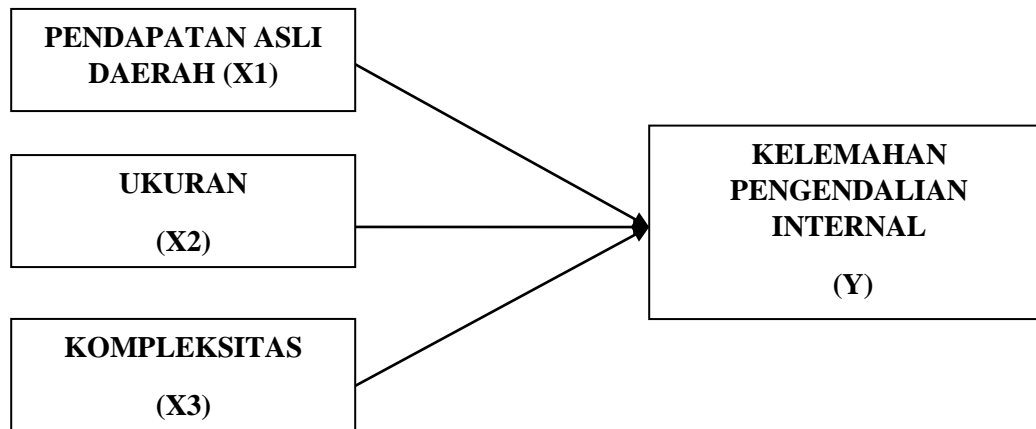
Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki wilayah kerja yang tersebar akan mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan pengendalian internalnya. Kompleksnya segmen atau cabang dalam organisasi pemerintah daerah akan berdampak pada resiko meningkatnya kasus pada kelemahan pengendalian internal sehingga pemerintah daerah

sangat membutuhkan pengendalian internal yang lebih canggih dan lebih baik lagi. Kompleksitas pemerintah daerah merupakan tingkat diferensiasi yang ada di pemerintah daerah sehingga dapat menyebabkan konflik atau masalah dalam pencapaian tujuan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Doyle, Ge dan Mc Vay (2007), menemukan hubungan positif antara jumlah segmen usaha atau cabang organisasi dengan kelemahan pengendalian internal. Dalam penelitian ini menerapkan segmen usaha atau cabang organisasi dalam suatu perusahaan menjadi jumlah SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang dimiliki pemerintah daerah. Penggunaan SKPD sebagai proksi dari kompleksitas pemerintah daerah karena diduga banyak masalah yang akan muncul dikareakan banyaknya jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam pemerintah daerah . Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatoris kausatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperlukan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di audit oleh BPK tahun 2014-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat tahun 2014-2017 yaitu berjumlah 19 Kab/Kota. Penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang telah disusun dan ditentukan oleh penulis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk data sudah jadi dan dicatat oleh pihak lain berupa hasil publikasi. Alasan peneliti menggunakan data sekunder yaitu dikarena data sekunder mempunyai tingkat validitas data lebih dan telah dijamin oleh pihak lain sehingga andal untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang akan diolah menjadi suatu hasil dalam penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan

cara mengumpulkan sumber data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2014-2017 dan telah di audit BPK sebagai lembaga yang berwenang. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Tabel 1
Sampel Penelitian

No	NAMA KABUPATEN/KOTA
1	Kabupaten Agam
2	Kabupaten Dharmasraya
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai
4	Kabupaten Lima Puluh Kota
5	Kabupaten Padang Pariaman
6	Kabupaten Pasaman
7	Kabupaten Pasaman Barat
8	Kabupaten Pesisir selatan
9	Kabupaten Sijunjung
10	Kabupaten Solok
11	Kabupaten Solok Selatan
12	Kabupaten Tanah Datar
13	Kota Bukittinggi
14	Kota Padang
15	Kota Padang Panjang
16	Kota Pariaman
17	Kota Payakumbuh
18	Kota Sawahlunto
19	Kota Solok

Sumber : BPK RI

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Adapun alat analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi, (Ghozali, 2016:19)

2. Statistitik Induktif

Model regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

$$YKPI = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

3. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas
- b. Uji Heterokedastisitas
- c. Uji Multikolinearitas
- d. Uji Autokorelasi

4. Uji Kelayakan Model

- a. Koefisien Determinasi (R^2)
- b. Uji Statistik F

5. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji statistik t. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$).

Variabel Penelitian & Pengukurannya

Tabel 2
Variabel Penelitian & Pengukurannya

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Ketidak kendalian yang cukup dan dapat meningkatkan resiko salah saji atau salah pencatatan dalam menyampaikan laporan keuangan.	Jumlah temuan atau kasus atas kelemahan Pengendalian Internal pada LKPD yang telah di audit BPK
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang di kelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.	Jumlah PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada LKPD yang telah diaudit BPK
Ukuran (<i>SIZE</i>)	Gambaran seberapa besar/kecil skala dari pemerintah daerah.	Total Aset dalam neraca pada LKPD yang telah diaudit BPK
Kompleksitas	Tingkatan diferensiasi yang ada di pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah.	Jumlah SKPD dalam entitas Akuntansi pada LKPD yang telah di audit BPK

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kelemahan SPI	76	2,00	13,00	6,8289	2,43523
PAD	76	26677826164	1515058426871	144162438865,63	253770820789,10
Ukuran Pemda	76	645974565709	7885040700285	1797811353031,64	1349573588168,35
Kompleksitas Pemda	76	27,00	54,00	37,1316	6,45
Valid N (listwise)	76				

Berdasarkan tabel 3 tentang hasil statistik deskriptif, dapat dimaknai bahwa kelemahan pengendalian internal yang sudah dihitung dengan jumlah temuan/kasus atas Sistem Pengendalian Internal dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 6,8289. Nilai minimum yang dihasilkan adalah 2,00, sedangkan nilai maksimumnya adalah 13,00, dan standar deviasinya adalah 2,43523.

Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Tabel 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,97979590
Most Extreme Differences	Absolute	,049
	Positive	,049
	Negative	-,028
Kolmogorov-Smirnov Z		,425
Asymp. Sig. (2-tailed)		,994

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4 tentang hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,994. Ini membuktikan bahwa nilai *Sig* sebesar $0,994 > 0,05$ dan dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 5 tentang hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel PAD diperoleh angka sebesar $1,115 < 10$, nilai VIF untuk variabel Ukuran (*size*) Pemda diperoleh angka sebesar $1,382 < 10$, nilai VIF untuk variabel Kompleksitas adalah sebesar $1,345 < 10$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Tabel 6 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,200	1,000		,200	,842		
PAD	7,128E-015	,000	,001	,010	,992	,897	1,115
Ukuran Pemda	-4,874E-015	,000	-,005	-,034	,973	,724	1,382
Kompleksitas Pemda	,045	,029	,207	1,550	,126	,743	1,345

a. Dependent Variable: abresid

Pada tabel 6 tentang uji heterokedastisitas, dapat diketahui bahwa nilai *Sig* PAD adalah sebesar $0,992 > 0,05$, nilai *Sig* Ukuran (*size*) pemda adalah sebesar $0,973 > 0,05$, nilai *Sig* Kompleksitas adalah sebesar $0,126 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 7
Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,238 ^a	,057	,017	2,41394	1,722

a. Predictors: (Constant), Kompleksitas Pemda, PAD, Ukuran Pemda

b. Dependent Variable: Kelemahan SPI

Pada tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) adalah sebesar 1,722. Jika dilihat pada tabel DW dengan $n = 19$ dan $K = 3$, maka nilai *dL* adalah sebesar 0,9666 dan nilai *dU* adalah sebesar 1,6851, serta hasil $4 - dU$ adalah sebesar 2,3419, dan $4 - dL$ adalah sebesar 3,0334. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW yaitu 1,722 berada di antara *dU* dan $4 - dU$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak mengandung masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,597	1,706		2,695	,009
PAD	4,264E-014	,000	,004	,037	,971
Ukuran Pemda	2,691E-013	,000	,149	1,108	,271
Kompleksitas Pemda	,047	,050	,124	,936	,352

a. Dependent Variable: Kelemahan SPI

Secara sistematis hasil analisis regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$KPI = 4,597 + 0,000000 \text{ PAD} + 0,000000 \text{ SIZE} + 0,047 \text{ KOM}$$

Dari persamaan tersebut merujuk pada variabel independen PAD, Ukuran (*size*) pemda, dan Kompleksitas Pemda terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Arti dari koefisien regresi pada tabel 8 tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta diperoleh sebesar 4,597 dimana jika variabel independen bernilai 0, maka nilai variabel dependen adalah sebesar 4,597.
- Nilai koefisien regresi PAD diperoleh sebesar 0,0000 dimana jika setiap peningkatan PAD sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan Kelemahan Pengendalian Internal sebesar 0,00000 dengan asumsi semua variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi ukuran (*size*) pemda diperoleh sebesar 0,000000 dimana setiap peningkatan ukuran pemda sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kelemahan pengendalian internal sebesar 0,000000 dengan asumsi semua variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi kompleksitas diperoleh sebesar 0,047 dimana setiap peningkatan kebijakan dividen sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan kelemahan pengendalian internal sebesar 0,047 dengan asumsi semua variabel lain konstan.

Uji Model

Tabel 9
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,238 ^a	,057	,017	2,41394	1,722

Predictors: (Constant), Kompleksitas Pemda, PAD, Ukuran Pemda

a. Dependent Variable: Kelemahan SPI

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,017 atau 1,7%. Ini menunjukkan bahwa sebesar 1,7% variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel PAD, Ukuran (*size*), kompleksitas pemda. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Tabel 10
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25,224	3	8,408	1,443	,237 ^b
Residual	419,553	72	5,827		
Total	444,776	75			

a. Dependent Variable: Kelemahan SPI

b. Predictors: (Constant), Kompleksitas Pemda, PAD, Ukuran Pemda

Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,237. Dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikansinya sebesar 5% atau 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan tidak adanya pengaruh PAD, ukuran (*size*) pemda, dan kompleksitas pemda secara bersama-sama terhadap kelemahan pengendalian internal.

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 11

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,597	1,706		2,695	,009
PAD	4,264E-014	,000	,004	,037	,971
Ukuran Pemda	2,691E-013	,000	,149	1,108	,271
Kompleksitas Pemda	,047	,050	,124	,936	,352

a. Dependent Variable: Kelemahan SPI

Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian untuk variabel independen PAD berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 0,037 dengan tingkat signifikansi 0,971 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak, dengan kata lain PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel Ukuran Pemda seperti yang terdapat pada tabel 13, dapat dilihat nilai t hitung adalah yaitu sebesar 1,108 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,271 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran pemda tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak.

Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil pengujian variabel kompleksitas pemda memiliki nilai t hitung negatif yaitu sebesar 0,936 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,352 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas pemda tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Artinya hipotesis 3 dalam penelitian ini ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

Hipotesis pertama (H1) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil uji t untuk variabel pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh angka sebesar 0,971, sehingga H1 penelitian ini ditolak, yang berarti PAD tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Hasil ini berarti setiap kenaikan dan penurunan PAD tidak akan berpengaruh terhadap kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Ini sebabkan Pemerintah Daerah yang mempunyai PAD lebih tinggi belum tentu memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dibandingka Pemerintah Daerah yang memiliki PAD lebih rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fauza (2015), Hartono, et al. (2014), Saputro dan Mahmud (2015), dan Rachmawati dan Handayani dan Handayani (2016) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh PAD terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Aini (2017), Martani dan Zaelani (2011), dan Iqbal (2017) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal.

Pengaruh Ukuran (Size) terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Ukuran (Size) memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil uji t dalam penelitian ini memperoleh hasil sebesar 0.271, sehingga H2 ditolak, yang berarti Size tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Ini menandakan bahwa Ukuran Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan Pengendalian Internal, artinya pemerintahan yang berpendapatan tinggi justru memiliki lebih banyak kelemahan Pengendalian Internal. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Kondisi ini tidak mendukung hasil penelitian Doyle et al. (2006), yang menunjukkan bahwa kelemahan Pengendalian Internal lebih banyak terjadi pada entitas kecil. Tidak terbuktinya hipotesis kedua diduga disebabkan karena perbedaan obyek penelitian. Dalam penelitiannya Doyle et al. (2006), menggunakan entitas bisnis sebagai obyek penelitian.

Pengaruh Kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

Hipotesis ketiga (H3) menduga bahwa Kompleksitas memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Dapat diketahui hasil uji t untuk variabel PAD sebesar 0,352, sehingga H3 ditolak, yang artinya Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013). Ini dikarenakan Pemerintah telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah baik Pusat, Provinsi serta Kabupaten/ Kota. Tujuannya adalah untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik dan amanat. Dimana SKPD merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Selain itu setiap pegawai juga harus memiliki komitmen organisasi yang kuat untuk memberikan prestasi terbaiknya bagi negara dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pada pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2014-2017. menurut hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap tiga hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan analisis linear berganda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), ukuran pemerintah daerah (size) dan kompleksitas pada pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pada pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2014-2017.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dirancang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Yang menyebabkan hasil penelitian ini mungkin akan berbeda jika dilakukan di wilayah lain, mengingat karakteristik yang dimiliki masing-masing wilayah di Indonesia sangat berbeda sebagai dasar acuannya.
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama 4 tahun anggaran yaitu tahun 2014 sampai dengan 2017.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku badan yang berwenang.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, Oleh sebab itu peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan Kelemahan pengendalian internal agar berkurangnya kasus temuan akibat kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada pemerintah daerah.

Bagi Penelitian Selanjutnya Diharapkan penelitian selanjutnya lebih dapat memaksimalkan penelitian dengan menambah faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian internal, seperti: pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sumber data yang digunakan maupun jangka waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Fitriatul. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Periode 2011-2012). UNRI. Riau.
- Arens, Alvin A., Elder, Randel J., Beasley, Mark S. 2012. *Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach. Ninth Edition*. Pearson Education International New Jersey.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. (2017). <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. (2018). <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2019.
- Comitte of Sponsoring Organizationz (COSO) of The Treadway Comission. <http://www.coso.org> Diakses pada tanggal 5 Juli 2019.
- Doyle, Jeffrey T.; Weili Ge, and Sarah E. McVay. (2007). Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting & Economics (JAE)*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=941467>.
- Fama dan Jensen. (1983). The Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26, pp.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Rudi. (2014). Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas terhadap Kelemhan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2011. *Skripsi Sarjana*. FE UNNES. Semarang.

- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. 305-360.
- KPMG. (2012). *A survey of fraud, bribery and corruption in Australia & New Zealand* 2012. *kpmg.com.au, kpmg.co.nz*.
- Kristanto, Septian Bayu. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, 9 (1).
- Martani dan Zaelani (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*, Buku 1, edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat.
- Nirmala, Swastia. 2012. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan dan Kompleksitas Transaksi terhadap Kelemahan pengendalian Intern. *Skripsi Sarjana*. FEB UNDIP. Semarang.
- Novilia, Fitri. (2017). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Temuan Audit Bpk Atas Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Nurillah, As Syifa. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Skripsi Sarjana*. FEB UNDIP. Semarang.
- Pamuji, Fahroni Arif. (2017). Pengaruh Size, PAD, dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. UMS. Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal*
- Pradana, Herdiawan Rudi. (2014). Pengaruh Resiko Bisnis, Struktur Aset, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Skripsi Sarjana*. FE UNNES. Semarang.
- Puspitasari, Titus. (2013). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Skripsi Sarjana*. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putri, Novi Kumala. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Ukuran Dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. (2013). Pengaruh PDRB, Ukuran dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Sarjana*. FE UNNES. Semarang.
- Sholikhah, Imroatus. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa tahun 2010). *Skripsi Sarjana*. FE UNNES. Semarang.
- Susanto. (2007). *Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutomo, Juda Pratama. 2018. Pengaruh PAD, dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. UMS. Surakarta.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Warren. (2003). *Accounting*. 20th edition. South Western. Mason- Ohio.
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang.
- Yani. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada.